

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI GEJAYAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Maria J. Wantah
PPs Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

This study aims to describe (1) the relevance of the implementation of the inclusive program for children with special needs; (2) input characteristics of those involved in the inclusive program; (3) the learning process; and (4) benefits of the inclusive program for children with special needs and the sustainability of the program. The data sources were classroom teachers, special guide teachers, and the principal. The data were collected through observations, interviews, and questionnaires using the CIPP (Context Input Process Product) model. The data were analyzed using the descriptive qualitative method on the basis of certain criteria. The research findings show that the implementation of the inclusive program in SDN Gejayan is carried out in order to provide children with special needs with education together with normal children in regular classes. The results of the input evaluation show that there are 23 children with special needs consisting of 1 blind child, 1 child with severely low vision, 1 mentally disabled child, 1 autistic child, and 19 children with learning difficulties. There are 2 special guide teachers for deaf children and autistic children with learning difficulties, so that the implementation of education for children with special needs has not met the criteria. Learning activities for children with special needs are carried out twice a week by special guide teachers. The results of the product evaluation show that children with special needs can benefit from the implementation of the inclusive program because they are allowed to learn together with normal children in regular classes although their achievement is not as good as that of normal children.

Keywords: children with special needs, inclusive program, regular classes, special guide teachers

A. Pendahuluan

Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang diberikan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), baik di sekolah khusus maupun di sekolah umum. ABK adalah anak yang mengalami 1) kelainan fisik, meliputi (a) tuna netra; (b) tuna rungu; dan (c) tuna daksa; 2) kelainan mental, meliputi (a) tunagrahita ringan; dan (b) tunagrahita

sedang; 3) kelainan perilaku, meliputi tuna laras, hiperaktif, autisme; dan (4) kelainan ganda.

Anak-anak tersebut di atas, memperoleh kesempatan untuk menerima pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Hal ini didukung oleh Undang-undang Sisdiknas Bab IV pasal 5 ayat 2 yang mengemukakan bahwa warga Negara yang memiliki kelainan

fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak untuk memperoleh pendidikan khusus.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta di seluruh dunia untuk membantu anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, seperti dalam pernyataan Salamanca yang melahirkan lima pernyataan. Pertama, menegaskan kembali komitmen terhadap pendidikan bagi semua. Mengakui akan perlu dan mendesaknya untuk memberikan pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa penyandang kebutuhan pendidikan khusus di dalam sistem pendidikan regular. Kedua, setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, dan sistem pendidikan yang harus dirancang, dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan mereka. Ketiga, menetapkan prinsip pendidikan inklusif sebagai undang-undang atau kebijakan sehingga semua anak ditempatkan di sekolah regular, kecuali bila terdapat alasan yang kuat untuk melakukan lain. Keempat, semua negara meminta perhatian masyarakat internasional agar mendukung pendidikan inklusif serta mendukung pengembangan pendidikan khusus sebagai bagian yang integral dari semua program pendidikan. Kelima, penyampaian penghargaan kepada pemerintah Spanyol, dan kepada UNESCO atas terselenggaranya konvensi, dan mendesak mereka untuk melakukan segala upaya agar deklarasi ini beserta kerangka aksinya memperoleh perhatian masyarakat dunia (Stubbs, 2002).

Untuk menunjang hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia dalam hal

ini Direktorat Pendidikan Luar Biasa dalam enam tahun terakhir mulai mensosialisasikan dan mengembangkan konsep pendidikan integratif bagi semua jenis kecacatan atau ABK dengan menggunakan model pendidikan inklusif. Selanjutnya, diperkuat dengan deklarasi kongres anak internasional di Bandung (2004) yang, memberikan jaminan sepenuhnya bagi ABK dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat, menyadari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang beragam, maka sepakat untuk menuju pendidikan inklusif.

Kenyataan sekarang ini menunjukkan bahwa pada umumnya sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif telah menampung jenis-jenis ABK yang ada di sekitarnya untuk menerima pendidikan bersama-sama dengan anak normal pada umumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak tuna netra, anak tuna rungu, anak tuna daksa, dan anak berkesulitan belajar dapat belajar bersama-sama dengan anak normal.

Untuk mengetahui apakah proses pembelajaran di sekolah yang menyelenggarakan program inklusi telah berlangsung dengan baik sehingga program tersebut dapat berhasil dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut dengan model evaluasi menggunakan CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah relevansi pelaksanaan program inklusif dengan kebutuhan ABK?
2. Bagaimanakah karakteristik ABK yang berkebutuhan khusus, kebutuhan belajar, guru, penyelenggara,

dan ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan program inklusif?

3. Bagaimanakah interaksi antara guru kelas, dan guru pembimbing khusus dengan ABK dalam proses belajar mengajar.
4. Apakah penyelenggaraan program inklusif bermanfaat bagi ABK

Untuk mengetahui, menemukan, dan memperbaiki penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SDN Gejayan Kabupaten Sleman dengan digunakan model CIPP.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Digunakan oleh Sekolah Dasar untuk mengevaluasi penyelenggaraan program inklusif.
2. Para penentu kebijakan (kepala sekolah, dan guru bidang studi) untuk menentukan evaluasi program yang sesuai dengan kebutuhan ABK.
3. Mengevaluasi kurikulum, apakah sesuai dengan kebutuhan ABK.

B. Landasan Teori

Abdurrahman dan Sudjadi (1996) mengemukakan ada dua pengertian yang sering membingungkan orang, yaitu tentang pengertian anak cacat atau penyandang ketunaan (*handicapped children*) dengan pengertian anak luar biasa atau berkelainan (*exceptional children*). Kebingungan untuk membedakan kedua pengertian tersebut karena yang diamati masyarakat pada umumnya adalah penyelenggaraan pendidikan luar biasa yang berlangsung di sekolah luar biasa (SLB). Anak yang sekolah di SLB adalah mereka yang menyandang ketunaan. Dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman bahwa anak luar biasa adalah anak yang cacat. Padahal, anak luar biasa memiliki

arti yang generik yang meliputi anak cacat atau anak penyandang ketunaan. Anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa tinggi atau yang memiliki bakat khusus di bidang tertentu, maka anak tersebut termasuk dalam kategori anak luar biasa atau berkelainan, tetapi bukan anak cacat. Sebaliknya, anak yang kecerdasan sangat rendah atau anak buta atau anak tuli, mereka termasuk dalam kategori anak luar biasa atau berkelainan sekaligus juga anak cacat.

Anak berkesulitan belajar bahasa, membaca, dan matematika termasuk dalam kategori (*children with learning disabilities*), meskipun intelegensinya berada pada taraf rata-rata atau di atas rata-rata disebut anak luar biasa atau anak berkelainan karena memerlukan pelayanan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa untuk mengoptimalkan prestasi belajarnya.

Berdasarkan uraian di atas, pada umumnya anak berkebutuhan khusus yang mengikuti program inklusi di SD adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, dan anak berkesulitan belajar. Anak yang termasuk dalam kategori seperti yang telah diuraikan di atas pada umumnya memiliki kemampuan rata-rata atau di atas rata-rata.

Djamarah dan Zain (2006) mengemukakan bahwa secara umum strategi adalah suatu garis besar haluan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berikut ini akan diuraikan empat strategi dasar dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu: (1) mengidentifikasi

serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik; (2) memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat; (3) memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar; dan (4) menetapkan norma-norma untuk menentukan batas minimal keberhasilan atau kriteria.

Pembelajaran didefinisikan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam definisi tersebut, terkandung makna bahwa dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode/strategi yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan inilah yang sebenarnya merupakan kegiatan inti pembelajaran.

Kondisi pembelajaran berinteraksi dengan metode pembelajaran untuk memperoleh hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu: (a) tujuan dan karakteristik bidang studi; (b) kendala dan karakteristik bidang studi; dan (c) karakteristik siswa. Tujuan pembelajaran merupakan pernyataan tentang hasil pembelajaran apa yang diharapkan. Karakteristik bidang studi merupakan aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Karakteristik siswa merupakan aspek-aspek atau kualitas perorangan siswa, seperti bakat, minat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimilikinya.

Pendidikan inklusif adalah model pengembangan Pendidikan Luar Biasa di mana siswa berkelainan atau berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa normal di lembaga pendidikan yang sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melalui program pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif belajar bersama-sama dengan siswa normal dengan menggunakan kurikulum yang sama.

Pendidikan inklusif termasuk konsep baru yang digunakan dengan menggambarkan *least restrictive environment* (LRE). LRE adalah menormalkan, *mainstreaming*, dan *the institutionalization*. Normalisasi yaitu menciptakan lingkungan sosial dan pendidikan senormal mungkin bagi anak berkelainan, dan *mainstreaming* adalah proses pengintegrasian bagi anak berkelainan dalam hubungan sehari-hari dengan anak normal dalam satu *setting* pendidikan, sedangkan *institutionalization* merupakan suatu proses pelepasan sebanyak mungkin anak berkelainan dari lembaga khusus masuk ke masyarakat biasa.

Di Indonesia, pendidikan inklusif ini baru diperkenalkan sekitar enam tahun terakhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa petunjuk teknis tentang pelaksanaan pendidikan inklusi belum ada. Padahal, petunjuk tersebut sangat dibutuhkan sekolah dalam untuk digunakan sebagai petunjuk pada waktu menempatkan siswa di kelas. Nasichin (2002) mengemukakan model penempatan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah: (a) kelas reguler atau integrasi penuh, peserta didik yang berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya sepanjang hari; (2) kelas reguler dengan kelompok *cluster* di

mana terdapat kelas reguler, namun di kelas tersebut terdapat juga kelompok khusus; (3) kelas reguler dengan *full out* (yaitu anak berkebutuhan khusus dari kelas reguler masuk ke dalam kelas khusus dan belajar bersama dengan guru pembimbing khusus yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu atau pada saat anak mengalami kesulitan dalam belajar); (4) kelas reguler dengan *cluster* dan *full out* (kelompok khusus dalam kelas reguler yang pada waktu-waktu tertentu dibimbing khusus di tempat tersendiri); (5) kelas khusus dengan beberapa pengintegrasian; dan (6) kelas khusus memberikan layanan pendidikan kepada beberapa anak berkebutuhan khusus dalam waktu tertentu.

Howard (1996) mengemukakan bahwa model *full inclusion* adalah pelayanan pendidikan di mana setiap anak berkelainan tidak hanya yang ringan, tetapi juga yang sedang ikut berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan rutin anak normal. *Mainstreaming* adalah bentuk pelayanan di mana anak berkelainan belajar bersama dengan anak normal atau berpartisipasi aktif dalam beberapa bidang studi di kelas normal. *Self-contained* ialah model pelayanan inklusi di mana anak berkebutuhan khusus mendapat pelayanan di ruangan khusus di sekolah reguler. Mereka memiliki dan mengikuti waktu terbanyak di kelas khusus dari guru pendidikan khusus.

Valadez dan Bamberger (1994) mengemukakan bahwa konteks, program, model atau kegiatan merupakan teori yang menjelaskan bagaimana sumberdaya, dana, dan kegiatan yang dilakukan memberikan dampak yang diinginkan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model yang baik dapat

memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menafsirkan dan memahami program yang sedang, atau yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat memperbaiki program yang lama atau menyusun program yang baru berdasarkan pengalaman tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa model ini mempunyai peranan yang penting untuk membantu, menyusun perencanaan, dan mendesain program, mengkaji dan mengevaluasi program, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan hasil program, serta membantu penilai dalam menyajikan temuan pada pengambil kebijakan.

Tujuan evaluasi program adalah untuk menilai kesesuaian rencana program dengan metode pelaksanaannya untuk mencapai, menilai hasil program, baik hasil yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Pelaksanaan evaluasi biasanya didasarkan pada model evaluasi tertentu dengan harapan informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan model evaluasi berorientasi pada tujuan, artinya tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan evaluasi merupakan pertimbangan utama dalam menentukan model evaluasi yang digunakan.

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007) menguraikan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah seperti berikut ini.

Pertama, kriteria sekolah. Setiap satuan pendidikan formal pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya implementasi penyelenggaraan yang kurang sesuai, maka setiap satuan pendidikan yang

akan menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu memenuhi beberapa kriteria, seperti (a) terdapat anak berkebutuhan khusus (ABK); dan (b) kesiapan sekolah.

Kedua, layanan dalam pendidikan inklusif yang terdiri beberapa hal, seperti berikut.

- a. Layanan pendidikan penuh di mana semua anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama di dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan guru kelas. Peran Guru Pendamping Khusus (GPK) bertanggung jawab dalam pembuatan program, monitor pelaksanaan program, dan mengevaluasi pelaksanaan program.
- b. Layanan pendidikan yang dimodifikasi adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama dengan anak pada umumnya dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi, atau guru lainnya untuk mata pelajaran dan aktivitas yang dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan baik. Sedangkan untuk guru pembimbing khusus (GPK) berperan dalam membimbing beberapa aktivitas tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan menggunakan program pembelajaran individual (PPI).
- c. Layanan pendidikan individualisasi di mana anak berkebutuhan khusus (ABK) mengikuti proses belajar bersama-sama anak pada umumnya dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan penuh guru pembimbing khusus (GPK) dengan menggunakan program pembelajaran individual (PPI).

Ketiga, manajemen sekolah meliputi: (a) pengelolaan peserta didik; (b) pe-

ngelolaan kurikulum; (c) pengelolaan pembelajaran; (d) pengelolaan penilaian; (e) pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; (f) pengelolaan sarana dan prasarana; (g) pengelolaan pembiayaan; dan (h) pengelolaan sumber daya masyarakat.

Keempat, identifikasi dan asesmen meliputi: (a) asesmen fungsional; dan (b) asesmen klinis. Kelima, kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah umum. Bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), kurikulum disesuaikan dengan tingkat kebutuhan karena hambatan dan kemampuan sangat bervariasi. Penyesuaian kurikulum diimplementasikan dalam bentuk program pembelajaran individual (PPI). Keenam, sistem penilaian; (a) sistem penilaian yang digunakan; (b) sistem kenaikan kelas; dan (c) sistem laporan hasil belajar. Ketujuh, bimbingan dan konseling. Kedelapan, pendidikan dan tenaga kependidikan: (a) pengertian dan ruang lingkup; dan (b) tugas pendidik. Kesembilan, sarana dan prasarana penunjang. Kesepuluh, pembiayaan. Kesebelas, pemberdayaan masyarakat. Kedua belas, mekanisme penyelenggaraan.

Stufflebeam dan kawan-kawan dalam Worthen dan Sander (1973) mengemukakan bahwa model CIPP merupakan model evaluasi program. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan memilih model CIPP sebagai model evaluasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi

suatu program, maka perlu menganalisis program yang dievaluasi berdasarkan komponen-komponen yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Kaufman dan Thomas (1980) mengemukakan bahwa unsur utama pada model tersebut ada 3 macam. Pertama, identifikasi informasi adalah menentukan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Identifikasi informasi biasanya dilakukan bersama antara penilai dan pembuat keputusan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menggunakan model evaluasi seperti yang telah diuraikan di atas memerlukan kerjasama antara penilai dan pembuat keputusan. Kedua, pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan penilai, dan jenis data yang dikumpulkan mengacu pada jenis informasi yang telah ditentukan pada tahap pertama. Ketiga, menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Berikut ini akan diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan CIPP.

Context evaluation (evaluasi tentang konteks) merupakan kegiatan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan kondisi sasaran atau lingkungan di mana program akan dilaksanakan, antara lain mencakup: analisis kebutuhan dan analisis tujuan program yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut. Hasil yang diharapkan dari evaluasi konteks ini adalah gambaran atau spesifikasi lingkungan program, kebutuhan lingkungan yang belum terpenuhi, dan tujuan program, serta kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan lingkungan.

Input evaluation (evaluasi tentang masukan program) merupakan kegiatan untuk menganalisis sumber dana dan daya yang diperlukan untuk men-

capai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hubungannya dengan program pendidikan atau pelatihan, masukan dapat dibedakan dalam 2 hal yaitu: (a) sasaran program pendidikan atau individu yang dikenai program tersebut; (b) masukan yang berupa dana dan peralatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Hasil evaluasi masukan merupakan gambaran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan 2 pertanyaan berikut. Pertama, apakah karakteristik sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan? Kedua, apakah peralatan yang tersedia atau yang digunakan cukup efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program?

Process evaluation (evaluasi terhadap proses pelaksanaan). Program yang baik biasanya sudah dirancang siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, apa bentuk kegiatannya, bagaimana kegiatan tersebut, dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Evaluasi proses berusaha memonitor pelaksanaan program untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara spesifik, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan evaluasi proses antara lain: (a) apakah kegiatan program sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?; (b) apakah kemampuan pelaksana program sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?; (c) apakah fasilitas yang tersedia cukup dimanfaatkan?; dan (d) hambatan-hambatan penting apakah yang dijumpai selama pelaksanaan program?

Evaluasi proses diperlukan untuk memperkecil kesalahan yang mungkin terjadi di lapangan dan apabila ada kesalahan atau hambatan dapat di-

antisipasi sedini mungkin dan dicari alternatif cara mengatasinya.

Product evaluation (evaluasi tentang hasil pelaksanaan) merupakan tahap terakhir di dalam model CIPP, bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil berfungsi untuk membantu penanggung jawab program atau pengambil keputusan untuk menentukan alternatif kebijakan berikutnya, yaitu meneruskan, memodifikasi, atau menghentikan program tersebut.

C. Metode Penelitian

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN Gejayan Kabupaten Sleman sehingga penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh *stufflebeam*. Variabel yang diteliti meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Konteks, dievaluasi secara kualitatif, yang meliputi kebutuhan peserta dan jumlah peserta.
- b. Input, dievaluasi secara kualitatif yang meliputi: (1) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); (2) Jenis-jenis ABK dan kebutuhannya; (3) guru

kelas, dan guru pendamping khusus; (4) pendidikan dan pengalaman guru kelas, dan guru pendamping khusus; (5) program pembelajaran meliputi frekuensi pendampingan guru pembimbing khusus untuk ABK; (6) prasarana/tempat belajar meliputi ketersediaan perlengkapan, kondisi ruang belajar; (7) bahan/sarana belajar meliputi keseimbangan antara jumlah ABK dengan sarana yang tersedia; (8) kesesuaian media/alat peraga yang digunakan oleh ABK.

- c. Proses, dievaluasi secara kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi berkenaan dengan aktivitas dan interaksi antara guru kelas, dan guru pembimbing khusus dengan ABK dalam proses belajar mengajar.
- d. Produk, dilakukan secara kualitatif terhadap kemajuan ABK dalam mengikuti program pendidikan inklusif.

Populasi penelitian ini adalah siswa SDN Gejayan Depok Sleman yang menyelenggarakan program inklusif. Penentuan lokasi ditentukan secara *purposive* atau dipilih dengan tujuan dan sengaja, karena karakteristik wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 1. SD yang Menyelenggarakan Program Inklusif dan Jenis-jenis ABK

No.	Nama Sekolah Dasar	Jenis ABK	Jumlah Siswa
1.	SDN Gejayan	a. Tuna netra	1
		b. Low vision	1
		c. Tunagrahita Ringan	2
		d. Autis	1
		e. Berkesulitan Belajar	18
Jumlah			23

Secara garis besar, metode pengumpulan data yang digunakan dalam pe-

nelitian ini adalah: (1) angket dipakai sebagai teknik pengumpulan survey,

yaitu untuk mengungkap data tentang ABK, guru, fasilitas pembelajaran, dan situasi dan kondisi sekolah di mana ABK berada; (2) observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas anak dalam kegiatan belajar mengajar, dan ketersediaan alat peraga yang digunakan guru pada waktu mengajar dan; (3) wawancara dilakukan pada beberapa guru SD dan Kepala sekolah. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan persentase. Untuk menginterpretasi data dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis dengan standar keberhasilan berikut: 80 – 100% = kategori baik, 60 – 80% = kategori cukup, dan < 60% = kategori kurang.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Layanan pendidikan inklusif yang dilaksanakan di SDN Gejayan, yaitu pada kelas I dan II karena ABK termasuk dalam kelas tersebut, dengan menggunakan layanan pendidikan yang dimodifikasi. Artinya, ABK belajar bersama-sama dengan anak normal di kelas reguler dengan bimbingan guru kelas. Untuk mata pelajaran umum diajar oleh guru kelas, sedangkan guru ABK berperan untuk membimbing beberapa aktivitas tertentu dengan menggunakan Program Pembelajaran Individual. Kegiatan guru ABK berlangsung 2 kali seminggu untuk mengajarkan pada anak tunanetra, *low vision*, tunagrahita ringan, dan autis. Anak berkesulitan belajar ditangani oleh guru kelas.

Dilihat dari jenis program untuk ABK sangat bervariasi tergantung kebutuhan ABK. Jumlah ABK sebanyak 23 orang yang terbagi dalam 5 jenis kekhususan, yaitu: tunanetra, *low vision*, tunagrahita ringan, autis, dan berkesulitan belajar. Guru pembimbing khusus (GPK) ada 2 orang yang memiliki ke-

hususnya tunarungu, pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif secara umum, dan untuk anak autis. Dalam mengajar di kelas guru kelas berdasarkan pada rencana pembelajaran, dan guru ABK berdasarkan Program Pengajaran Individual.

GPK mengajar pada anak tunanetra dan *low vision* tentang menulis braille, dan orientasi dan mobilitas, untuk anak tunagrahita tentang bina diri, dengan menggunakan Program Pembelajaran Individual. Untuk mata pelajaran yang lain diajarkan oleh guru kelas dengan menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Namun, seringkali guru menggunakan tutor sebaya sehingga anak normal bisa membantu ABK. Pada anak autis tentang metode *Applied Behavior Analysis* (ABA) tujuan untuk meminimalkan kegagalan anak, dan memaksimalkan keberhasilan anak, yaitu dengan mengajarkan bagian terkecil yang sesuai dengan kemampuan anak. Aktivitas anak di kelas masih kurang baik karena membutuhkan penyesuaian dengan anak normal.

Penilaian terhadap proses belajar dilakukan selama proses belajar melalui pengamatan dilakukan pada guru kelas dan guru pembimbing khusus. Guru Pembimbing Khusus (GPK) meliputi sikap, kegiatan membuka pembelajaran, kesesuaian materi, metode, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, interaksi GPK dengan ABK, dan kegiatan menutup pelajaran termasuk dalam kategori cukup. Hal ini dikarenakan GPK tersebut memiliki kemampuan kekhususan tunarungu.

Sarana dan fasilitas pendukung penyelenggaraan program pendidikan inklusif belum memadai karena peralatan yang menunjang untuk proses pembelajaran untuk ABK sangat kurang.

Misalnya, anak tunanetra yang sekolah SD yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif baru dapat menulis dengan menggunakan reglet dan stylus. Sedangkan anak tunanetra yang belajar di SLB/A, tersedia fasilitas yang lengkap, seperti komputer dengan menggunakan program Jaws yang dilengkapi dengan printer Braille. Begitu juga dengan anak *low vision*.

Hambatan-hambatan yaitu masalah yang muncul di kelas maupun di sekolah seperti pemanfaatan laboratorium sangat kurang karena kurangnya peralatan untuk ABK. Pengetahuan guru tentang ABK secara umum belum memadai sehingga belum terampil dalam menggunakan peralatan tertentu. Hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Pengamatan tentang Pelaksanaan Program Inklusif di SDN Gejayan

No.	Pelaksanaan Program Inklusif	Kriteria		
		Baik	Cukup	Kurang
	CONTEXT			
1.	Tujuan Sekolah untuk penyelenggaraan program Inklusif	√		
2.	Kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan lingkungan	√		
3.	Penerimaan siswa normal, orang tua dan guru terhadap ABK di sekolah	√		
4.	Pelaksanaan Program Inklusif		√	
	INPUT			
1.	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)			
2.	Persiapan mengajar guru kelas (RP)	√		
3.	Kegiatan membuka pembelajaran	√		
4.	Kesesuaian materi		√	
5.	Penggunaan metode		√	
6.	Keterampilan menjelaskan	√		
7.	Keterampilan menggunakan alat peraga		√	
8.	Keterampilan bertanya		√	
9.	Interaksi guru kelas dengan ABK		√	
10.	Kegiatan menutup pelajaran		√	
11.	Evaluasi	√		
12.	Persiapan mengajar guru ABK (PPI)		√	
13.	Kesesuaian materi dengan kebutuhan ABK	√		
14.	Keterampilan menjelaskan		√	
15.	Keterampilan guru dalam menggunakan reglet & stylus			√
16.	Keterampilan guru dalam mengajarkan penggunaan reglet dan pen			√
17.	Keterampilan guru dalam mengajarkan orientasi dan mobilitas			√
18.	Keterampilan guru dalam mengajarkan bina diri (mengurus diri sendiri) untuk anak tunagrahita		√	
19.	Keterampilan mengajar pada anak autis		√	
	PROCESS EVALUATION			
20.	Ketersediaan sarana untuk anak tunanetra			√
21.	Ketersediaan sarana untuk anak low vision			√
22.	Ketersediaan sarana untuk tunagrahita			√
23.	Ketersediaan sarana untuk anak autis			√
24.	Ketersediaan sarana untuk anak berkesulitan belajar			√
25.	Interaksi guru dengan ABK		√	
	PRODUCT EVALUATION			

1.	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat belajar bersama-sama dengan anak normal			
----	--	--	--	--

Secara keseluruhan, penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SDN Gejayan belum sesuai dengan kriteria yang telah dikeluarkan oleh Direktorat PSLB. Hal ini disebabkan kegiatan tersebut baru di mulai pada tahun 2005 sehingga masih dalam proses pembenahan.

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan di atas, simpulan penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan konteks, pelaksanaan program pendidikan inklusif di SDN belum sesuai dengan yang ditargetkan secara nasional.
- b. Berkaitan dengan *input*, seperti ABK, guru kelas, dan guru pembimbing khusus serta penyelenggaraannya belum sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Terdapat 5 jenis ABK yang sekolah di SDN Gejayan. GPK yang belum sesuai dengan kekhususan ABK yang ada di sekolah tersebut. Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh GPK masih bersifat umum. Fasilitas dan sarana serta prasarana yang tersedia masih belum memadai. Kurangnya kegiatan pelatihan tentang ABK yang diikuti oleh GPK.
- c. Proses pembelajaran secara umum sudah sesuai dengan rencana berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Secara umum aktivitas pembelajaran dapat dikategorikan baik. Namun proses pembelajaran untuk ABK seringkali tidak sesuai

karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ABK.

- d. Berkaitan dengan produk, manfaat penyelenggaraan program inklusif sudah dapat dirasakan oleh ABK, karena mereka boleh belajar bersama-sama dengan anak normal di kelas reguler walaupun hasil belajar yang dicapai oleh ABK belum seperti dengan anak normal pada umumnya.

2. Saran

- a. Agar penyelenggaraan program pendidikan inklusif dapat berhasil dengan baik, pihak penyelenggara program tersebut perlu memperhatikan komponen-komponen yang menunjang program tersebut seperti ketersediaan tenaga yang memadai, sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- b. Perlu mengikutsertakan guru ABK dalam kegiatan pelatihan tentang kekhususan yang ada di sekolah tersebut.
- c. Guru ABK yang berpendidikan S1 PLB, perlu melanjutkan studi ke S1 PLB sehingga dapat meningkatkan kemampuannya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman dan Sudjadi. 1996. *Pendidikan Luar Biasa Umum*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Annonymous. 2006. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Dirjen Mendikdasmen Depdiknas.

- _____. 2007. *Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusi*. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Dirjen Mendikdasmen Depdiknas.
- Ashman, A. & Elkins, J. 1994. *Educating with Special Needs*. Australia: Prentice Hall.
- Bowd, A. 1990. *Exceptional Children In Class*. Australia: Hargreen Publishing Company.
- Djamarah dan Zain. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Howard, V.P., Williams B.F., & Eppert C. 1996. *Very Young Children With Special Needs: A Formation Approach For The 21st Century*. New Jersey: Upper Source River Prentice-Hall, Inc.
- Kaufman R., dan Thomas S. 1980. *Evaluation Without Fear*. New York: New Viewpoints.
- Kirk & Gallagher, 1986. *Educating Exceptional Children*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Nasichin. 2002. "Kebijakan Direktorat PLB tentang Layanan Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Pendidikan Khusus dan Berkesulitan Belajar. *Makalah*; Disajikan pada Seminar Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Stubbs. 2002. *Inclusive Education: Where there are few resources*. The Atlas Alliance global support to disabled people.
- Valadez, J & Bamberger M. 1994. *Monitoring and Evaluating Social Programs in Developing Countries. A Handbook for Policymakers; Managers, and Researcher*. Washington D.C: The Work Bank.
- Worthen B.R., dan Sanders, J.R. 1973. *Educational Evaluation: Theory and Practice*. Belmont California: A Charles A. Jones Publication.